

## Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi Siswa SMA di Kabupaten Ponorogo

Ambiro Puji Asmaroini<sup>1</sup> dan Prihma Sinta Utami<sup>2</sup>  
[ambirop@gmail.com](mailto:ambirop@gmail.com)<sup>1</sup> dan [prihmasinta@gmail.com](mailto:prihmasinta@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo<sup>1 2</sup>

### Abstrak

*Kerangka pemikiran penelitian ini bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. SMA di Ponorogo merupakan satu lingkungan yang sangat kondusif dan memungkinkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan berbagai macam kegiatan pelaksanaan demokrasi di lingkungan SMA di Kabupten Ponorogo. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data, yaitu: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dilaksanakan dengan cara yang sama oleh setiap sekolah. Siswa sudah melaksanakan demokrasi. Semua itu dilaksanakan karena pembelajaran demokrasi berorientasi kepada siswa, semua untuk kesejahteraan siswa. SMA di Kabupaten Ponorogo memiliki cara yang sama dalam melaksanakan pendidikan demokrasi, antara lain guru mengarahkan untuk menerapkan praktek demokrasi antara lain: diskusi kelompok, berpendapat, musyawarah, pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus kelas, pemilihan ketua OSIS (SMA umum), pemilihan Ketua IPM (SMA Muhammadiyah), Pemilihan ketua OSDA (SMA Pondok Darut Taqwa), pemilihan Dewan Ambalan (DA), pemilihan ketua HW (SMA Muhammadiyah), voting, kerja bakti, bakti sosial, pemilihan ekstrakurikuler, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan semua sekolah sudah demokratis dan berbasis siswa karena partisipasi siswa yang lebih diutamakan.*

Kata Kunci: *demokrasi, siswa, sekolah*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dikuatkan dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen keempat yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. dengan demikian, masyarakat Indonesia merasakan kebebasan antara lain: kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi di depan umum yang sudah dijamin oleh Undang-Undang.

Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ditandai dengan adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak tercantum di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain hak untuk persamaan dalam bidang hukum, hak mendapat pekerjaan, hak berpendapat dan berorganisasi, hak pertahanan dan keamanan, hak beragama, hak pendidikan, hak mengembangkan budaya, hak mendapatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Selain adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia maka adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah.

Atas dasar perundang-undangan, demokrasi di lingkungan sekolah telah

berkembang. Dengan prinsip demokrasi untuk pengambilan keputusan dan kebaikan bersama. Partisipasi siswa dalam melaksanakan budaya demokrasi salah satunya dibuktikan dengan adanya organisasi siswa yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah).

Perlu diketahui bersama bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah haruslah menggunakan cara demokrasi yang sehat, adil, bersih dan tidak ada permusuhan. Walau perbedaan pendapat itu pasti ada, selalu kita ingat bahwa perbedaan adalah salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang mampu menghargai segala perbedaan. Mulai dari perbedaan bahasa, agama, jenis kelamin, keinginan, latar belakang, namun masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Pendidikan Demokrasi di sekolah merupakan satu lingkungan yang sangat kondusif dan memungkinkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Sejarah menunjukkan bahwa pemuda dan mahasiswa selalu menjadi bagian dari pilar demokrasi, sebagai pelopor, penggerak, bahkan pengambil keputusan. Hal ini dibuktikan pada era Sumpah Pemuda 1928, pergerakan 1945,

angkatan 1966 yang membidani Tritura, Malari 1974, 1978, dan Reformasi 1998 (Fadhilah dan Nuraiana, 2011: 47). Peran siswa sering kali sebagai pembawa perubahan atau digelar sebagai "*agent of change*".

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan pelaksanaan pendidikan demokrasi siswa SMA di Kabupaten Ponorogo.

Dari paparan yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pendidikan demokrasi di tingkat SMA di Kabupaten Ponorogo?

Berdasar pada masalah tersebut diatas, maka penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk: Memahami pelaksanaan pendidikan demokrasi di tingkat SMA di Kabupaten Ponorogo.

## METODE

### Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) Tahap penyelesaian, sebagai berikut:

#### 1. Tahap Persiapan

##### 1) Menyusun rancangan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian kualitatif berupa proposal penelitian.

##### 2) Perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka untuk menjaga kelancaran pelaksanaan penelitian ini, peneliti memerlukan izin dengan prosedur sebagai berikut: Permintaan surat pengantar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo ke Bakesbangpolingmas Kabupaten Ponorogo. Kemudian mendapatkan surat pengantar kepada Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Ponorogo.

##### 3) Penyusunan instrumen penelitian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian dengan penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara. Untuk memudahkan jalannya penelitian sebelum peneliti ke lapangan, peneliti membuat daftar pertanyaan untuk wawancara.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

##### 1) Pengumpulan data

Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan demokrasi di SMA. Adapun datanya diperoleh dari 15 SMA di Kabupaten Ponorogo.

##### 2) Pengolahan data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah nantinya dalam analisis data.

##### 3) Analisis data

Setelah data terkumpul dan tersusun, kemudian data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data.

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang telah terkumpul, dan analisis yang telah dilakukan.

#### 3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap terakhir dari penelitian, semua data yang telah diolah dan dianalisis oleh penulis dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul "Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi siswa SMA di Kabupaten Ponorogo".

### Lokasi penelitian

SMAN 1 Babadan Kabupaten Ponorogo, SMAN 1 Balong Kabupaten Ponorogo, SMAN 1 Bungkal Kabupaten Ponorogo, SMAN 1 Badegan Kabupaten Ponorogo, SMAN 1 Jenangan Kabupaten Ponorogo, SMAN 1 Jetis Kabupaten Ponorogo, SMA Muhammadiyah 3 Ponorogo, SMAN 2 Ponorogo, SMAN 3 Ponorogo, SMA Bakti Ponorogo, SMA Merdeka Ponorogo, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, SMAN 1 Pulung Kabupaten Ponorogo, SMAN 1 Sambit Kabupaten Ponorogo, dan SMA IT Darut Taqwa Kabupaten Ponorogo.

### Peubah yang diamati/diukur

Peubah yang diamati adalah pelaksanaan pendidikan demokrasi siswa SMA di Kabupaten Ponorogo.

### **Rancangan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan rancangan penelitian kualitatif yaitu yang bertujuan untuk memahami pelaksanaan pendidikan demokrasi SMA di Kabupaten Ponorogo. Peneliti mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan demokrasi siswa SMA di Kabupaten Ponorogo.

### **Teknik pengumpulan dan analisis data**

Menurut Wiyono (2007:90) analisis data adalah suatu proses menyusun data agar bisa ditafsirkan dan disimpulkan. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007: 248), menjelaskan bahwa teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Ada tiga langkah yang bisa dilakukan dalam proses analisis data, antara lain: reduksi data, display data, dan verifikasi data/kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi di Tingkat SMA di Kabupaten Ponorogo**

#### **1) SMAN 1 Babadan**

Ibu Wiji merupakan guru pengampu mata pelajaran PPKn di SMAN 1 Babadan. Berdasarkan hasil wawancara, pendidika demokrasi di kelas dilaksanakan dengan cara memberikan materi demokrasi di kelas 10 SMA. Cara memberikan pendidikannya siswa diarahkan untuk diskusi kelas, musyawarah kelas, pengambilan suara terbanyak dan pemilihan ketua kelas. Semua itu siswa sendiri yang menentukan. Jika diluar kelas dengan adanya pilihan ketua OSIS yang diadakan kegiatan menyerupai Pemilu menggunakan kotak suara. Di bawah ini salah satu kegiatan pelaksanaan dari demokrasi di kelas.

Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa siswa, pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan musyawarah pemilihan ketua kelas, musyawarah dalam melaksanakan kegiatan OSIS, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua Dewan Ambalan, diskusi kelompok, dan pembagian tugas kelompok. Di

bawah ini gambar 5.2 merupakan kegiatan pelaksanaan dari demokrasi.

#### **2) SMAN 1 Balong**

Ibu Rustiah, S.Pd selaku guru PPKn di SMA 1 Balong. Berdasarkan hasil penelitian dalam memberika pendidikan demokrasi di kelas dengan diadakan diskusi kelas, pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas. Sedangkan di luar kelas dilaksanakan dengan cara pemilihan ketua OSIS.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa di SMAN 1 Balong, demokrasi yang dilaksanakan antara lain pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, musyawarah kelas, kerja bakti, bakti sosial dan diskusi.

#### **3) SMAN 1 Bungkal**

Ibu Lilik selaku guru PPKn di SMAN 1 Bungkal. Berdasarkan hasil wawancara di kelas, pendidikan demokrasi dilaksanakan dengan memberikan keluasaan kepada siswa untuk berpendapat. Misalnya saat guru memberikan soal, siswa dibebaskan untuk menjawab semampunya. Diskusi kelas juga dilaksanakan namun siswa lebih ingin diberikan penjelasan terlebih dahulu. Sedangkan di luar kelas diadakannya pilihan ketua OSIS yang ada tinta, kotak suara, dan kartu suara.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa siswa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi dengan pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, pemilihan sie kebersihan dan sie keamanan kelas. Ada juga kegiatan diskusi kelas yang dipresentasikan dan pilihan ketua OSIS.

#### **4) SMAN 1 Badegan**

Ibu Nurul selaku guru PPKn di SMAN 1 Badegan memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan mengajarkan kepada siswa untuk diskusi, pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus dan juga pemilihan ketua OSIS. Sedangkan wawancara kepada beberapa siswa pelaksanaan demokrasi dengan pilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, voting, rapat saat sekolah akan mengadakan acara dan diskusi di dalam kelas.

#### **5) SMAN 1 Jenangan**

Bapak Sariyono selaku guru di SMAN 1 Jenangan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan cara mempraktekkan pemilu di kelas saat materi

pemilu, diskusi kelas, dan pilihan ketua OSIS. Sedangkan wawancara kepada siswa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan cara pilihan ketua kelas, pilihan ketua OSIS, rapat, dan musyawarah.

6) SMAN 1 Jetis

Ibu Sumarni, S.Pd selaku guru PPKn yang mengajar di SMAN 1 Jetis. Berdasarkan hasil wawancara, pendidikan demokrasi dilaksanakan dengan memberikan materi. Kemudian pemberian tugas kelompok kepada siswa untuk kelompoknya bebas siswa memilih anggota kelompok untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Selain itu adanya pengurus kelas seperti ketua kelas dan wakilnya. Sedangkan wawancara kepada siswa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi dengan musyawarah, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, pemilihan Dewan Ambalan, dan pemilihan pengurus kelas.

7) SMA Muhammadiyah 3 Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada Bapak Didik, selaku guru PPKn di SMA Muhammadiyah 3 Ponorogo, pendidikan demokrasi dilaksanakan dengan diskusi kelas, pemilihan ketua IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) untuk sekolah Muhammadiyah, pemilihan pengurus kelas, dan pemilihan ketua WH. Sedangkan hasil wawancara kepada siswa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan cara pemilihan ketua IPM, pengurus kelas, musyawarah anggota IPM dan musyawarah DA.

8) SMAN 2 Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru PPKn Ibu Mukti Sintawati, S.Pd demokrasi di SMA 2 sudah dilaksanakan dengan baik. Pendidikan demokrasi antara lain pilihan ketua kelas, pilihan ketua OSIS, siswa dilatih berbicara di depan kelas, diskusi kelas, dan pilihan ketua OSIS. Sedangkan hasil wawancara kepada siswa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi dengan rapat rutin, rapat koordinas kegiatan sekolah, diskusi kelas, dan pemilihan ketua even.

9) SMAN 3 Ponorogo

Berdasarkan wawancara kepada siswa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi dengan mengikuti organisasi OSIS, pemilihan ketua OSIS, mengikuti PMR,

pramuka, diskusi, dan belajar kelompok. Sedangkan wawancara kepada guru PPKn yaitu Bapak Sutrisno, M.Pd, pendidikan demokrasi dilaksanakan dengan cara memberikan materi tentang demokrasi kelas X dan XI, lalu memberikan tugas berupa kunjungan ke DPR untuk mengetahui rapat. Selain itu menerapkan diskusi kelas.

10) SMA Bakti Ponorogo

Bapak Windra Herdianto, SH, S.Pd, M.Pd.I selaku guru PPKn di SMA Bakti Ponorogo. Pendidikan demokrasi dilaksanakan dengan diskusi di kelas, di mana dalam diskusi siswa belajar berbicara, bertanya dan membuat pertanyaan. Jika diluar kelas pendidikan demokrasi melalui praktek lapangan ke pengadilan negeri Ponorogo, dan adanya Pilihan Ketua OSIS. Sedangkan wawancara keada beberapa siswa di SMA Bakti Ponorogo dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan demokrasi dengan diskusi kelas, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, menyampaikan pendapat, rapat saat akan mengadakan kegiatan seperti futsal dan perpisahan.

11) SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru PPKn SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu Ibu Sudjarwati, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan cara diskusi kelas, siswa berpendapat, presentasi, kultum bagi siswa yang tanpa ditunjuk setiap hari Jumat sebelum shalat dhuhur. Selain itu adanya pemilihan ketua IPM. Sedangkan hasil wawancara kepada siswa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi dengan cara memilih kegiatan ekstrakurikuler, pilihan ketua OSIS, pilihan ketua kelas, diskusi, dan musyawarah.

12) SMAN 1 Pulung

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Windra selaku guru PPKn di SMAN 1 Pulung sebagai berikut:

“Pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan memberikan materi demokrasi dan memberikan tugas-tugas kepada siswa, lalu membentuk kelompok. Di dalam kelompok siswa bisa belajar diskusi, berpendapat dan memecahkan masalah, serta adanya pemilihan ketua kelas. Sedangkan pelaksanaan di luar kelas dengan cara pemilihan ketua OSIS”.

Sedangkan pelaksanaan di luar kelas dengan cara pemilihan ketua OSIS, dan pemilihan ketua kelas. Sedangkan wawancara kepada siswa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan cara pemilihan ketua OSIS, diskusi, musyawarah kegiatan, pilihan ketua kelas dan pengurus kelas, dan debat. Di bawah ini merupakan foto kegiatan pemilihan ketua OSIS.

#### 13) SMAN 1 Sambit

Ibu Herny selaku guru PPKn di SMAN 1 Sambit. Pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan cara diskusi kelompok, musyawarah kelas, pilihan pengurus kelas, dan pemilihan ketua OSIS. Sedangkan wawancara kepada siswa pendidikan demokrasi dilaksanakan dengan pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua ekstrakurikuler english corner, pemilihan pengurus kelas, dan dalam diskusi kelas siswa sering berpendapat.

#### 14) SMA IT Darut Taqwa

Suharto, SE merupakan guru PPKn di SMA IT Darut Taqwa. Sekolah ini merupakan Pondok yang terdiri dari pondok laki-laki dan pondok perempuan. Pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan cara diskusi kelas, materi tentang demokrasi, pemilihan Organisasi Santri Darut Taqwa (OSDA), kepramukaan, mengadakan even, dan menyampaikan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan wawancara kepada siswa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi dengan mengadakan kegiatan pondok seperti pramuka, MOS, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSDA, dan diskusi kelas.

#### 15) SMA Merdeka Ponorogo

Berdasarkan wawancara kepada guru PPKn SMA Merdeka Ponorogo, Bapak Surya menyampaikan sebagai berikut:

“Pendidikan demokrasi dilaksanakan dengan cara memberikan umpan balik saat guru memberikan penjelasan kepada siswa. Misalnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk bertanya terkait materi yang belum mampu dipahami oleh siswa. Diskusi juga dilakukan di kelas pada materi tertentu. Selain itu, pemberian materi terkait demokrasi di kelas X dan XI “.

Praktek dari demokrasi di sekolah antara lain pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, dan siswa diberi kebebasan untuk

memilih kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan wawancara kepada beberapa siswa dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi selama ini dilaksanakan dengan diskusi kelas, menghargai pendapat siswa lain, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Selain itu, adanya musyawarah kelas, musyawarah saat akan mengadakan suatu kegiatan OSIS, menentukan lokasi study tour bagi kelas XII.

Dari semua penjelasan 15 SMA di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dilaksanakan dengan cara yang sama oleh setiap sekolah. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi (Winarno, 2008: 111-112). Dari pendapat tersebut jelas bahwa pendidikan demokrasi dilaksanakan dengan tujuan agar demokrasi tersebut tertanam dalam jiwa generasi muda / siswa di sekolah.

Siswa sudah melaksanakan demokrasi antara lain dengan diskusi kelompok, berpendapat, musyawarah, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus kelas, pemilihan ketua OSIS/OSDA/IPM, pemilihan ketua HW/DA, voting, kerja bakti, bakti sosial, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Semua itu dilaksanakan karena pembelajaran demokrasi berorientasi kepada siswa, semua untuk kesejahteraan siswa. Sesuai dengan pendapat Pasaribu (2005: 143) Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Pendapat Pasaribu tersebut dalam konteks negara, sedangkan sekolah merupakan bagian dari kehidupan yang dilaksanakan dalam berbangsa dan bernegara.

#### SIMPULAN

SMA di Kabupaten Ponorogo memiliki cara yang sama dalam melaksanakan pendidikan demokrasi, antara lain guru mengarahkan untuk menerapkan praktek demokrasi antara lain: diskusi kelompok, berpendapat, musyawarah, pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus kelas, pemilihan

ketua OSIS (SMA umum), pemilihan Ketua IPM (SMA Muhammadiyah), Pemilihan ketua OSDA (SMA Pondok Darut Taqwa), pemilihan Dewan Ambalan (DA), pemilihan ketua HW (SMA Muhammadiyah), voting, kerja bakti, bakti sosial, pemilihan ekstrakurikuler, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan semua sekolah sudah demokratis dan berbasis siswa karena partisipasi siswa yang lebih diutamakan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fadhilah dan Nuraiana. 2011. *Penerapan Demokrasi di Lingkungan Gerakan Mahasiswa UNISMA Bekasi* (Jurnal Vol 2 No.2)
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Pasaribu, Rowland, B.F. 2005. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Kompas
- Undang-Undang Dasar Negara Tepublik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat
- Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wiyono, Bambang, Budi. 2007. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research)* Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang